BUPATI BALANGAN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI BALANGAN
NOMOR 188.45/ 890 /Kum TAHUN 2023

TENTANG

INDIKATOR KINERJA UTAMA
PEMERINTAH KABUPATEN BALANGAN

BUPATI BALANGAN,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka pengukuran dan peningkatan kinerja serta untuk lebih meningkatkan akuntabilitas kinerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Balangan, perlu adanya Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Balangan;

b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Menteri Pendayagunaan aparatur Negara Nomor : PER/9/M.PAN/2027 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, perlu menetapkan indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Balangan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentangIndikator Kinerja Utamai Pemerintah Kabupaten Balangan.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4265);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
6. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 1464);
8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2027 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan nInstansi Pemerintah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2021 Nomor 2);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG INDIKATOR KINERJA UTAMA PEMERINTAH KABUPATEN BALANGAN.

KESATU : Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Balangan adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud diktum KESATU sebagai berikut ::

a. merupakan ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian tujuan serta sasaran Pemerintah Kabupaten Balangan dan sasaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang ditetapkan melalui indikator kinerja yang memberikan penjelasan baik sebagai acuan kuantitatif maupun kualitatif mengenai apa yang dilakukan untuk menetukan apakah tujuan sasaran sudah tercapai;

b. sebagai acuan bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah, Unit Kerja, Unut Kerja Mandiri, dalam menentukan kinerja utama yg akan dihujudkan, dan;

c. untuk memperoleh informasi kinerja yang diperlukan dalam penyelenggaraan manajemen kinerja dan ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis rencana pembangunan daerah dan SKPD yang akan digunakan untuk perbaikan kinerja dan akuntabilitas kinerja;

.

Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Paringin
pada tanggal 29 Desember 2023

BUPATI BALANGAN,

H. ABDUL HADI

LAMPIRAN

KEPUTUSAN BUPATI BALANGAN

NOMOR : 188.45/ 890 /KUM TAHUN 2023

TENTANG : 29 Desember 2023

INDIKATOR KINERJA UTAMA PEMERINTAH KABUPATEN BALANGAN

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) PEMERINTAH KABUPATEN BALANGAN 2021-2026

NO.	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	PENJELASAN (MAKNA, ALASAN PEMILIHAN DAN CARA PERHITUNGAN)	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1.	Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi	1. Meningkatnya Kontribusi Ekonomi Sektor Unggulan Non Pertambangan	1. Laju Pertumbuhan Ekonomi Sektor Industri Pengolahan	Makna : Laju Pertumbuhan Ekonomi Sektor Industri Pengolahan merupakan indikator untuk menggambarkan peran sektor industri pengolahan dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi.	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Data BPS, Dinas Perindustrian dan Perdagangan
				Alasan Pemilihan : Laju Pertumbuhan Ekonomi Sektor Industri Pengolahan memberikan gambaran dan informasi yang sangat penting untuk mengetahui output pada sektor ekonomi dan melihat pertumbuhan di suatu wilayah tertentu. Dengan bantuan data Industri pengolahan, maka dapat ditentukan sektor unggulan (leading sector) di suatu daerah/wilayah.		
				Rumus Perhitungan : Data BPS lapangan usaha industri pengolahan berdasarkan PDRB atas dasar harga konstan 2010		
			2. Laju Pertumbuhan Ekonomi Sektor Perdagangan	Makna : Laju Pertumbuhan Ekonomi Sektor Perdagangan merupakan indikator untuk menggambarkan peran sektor Perdagangan, Pengolahan dan jasa dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi.	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Data BPS, Dinas Perindustrian dan Perdagangan
				Alasan Pemilihan : Laju Pertumbuhan Ekonomi Sektor Perdagangan memberikan gambaran dan informasi yang sangat penting untuk mengetahui output pada sektor ekonomi dan melihat pertumbuhan di suatu wilayah tertentu. Dengan bantuan data PDRB, maka dapat ditentukannya sektor unggulan (leading sector) di suatu daerah/wilayah.		
				Rumus Perhitungan : Data BPS lapangan usaha sektor perdagangan berdasarkan PDRB atas dasar harga konstan 2010		
			3 Laju Pertumbuhan Ekonomi Pertanian dan Perikanan	Makna : Laju Pertumbuhan Ekonomi Pertanian dan Perikanan merupakan indikator untuk menggambarkan peran sektor Pertanian dan Perikanan dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi.	Dinas Ketahanan Pangan Pertanian dan Perikanan	Data BPS, Dinas Ketahanan Pangan Pertanian dan Perikanan
				Alasan Pemilihan : Laju Pertumbuhan Ekonomi Pertanian dan Perikanan memberikan gambaran dan informasi yang sangat penting untuk mengetahui output pada sektor ekonomi dan melihat pertumbuhan di suatu wilayah tertentu. Dengan bantuan data PDRB, maka dapat ditentukannya sektor unggulan (leading sector) di suatu daerah/wilayah.		

NO.	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	PENJELASAN (MAKNA, ALASAN PEMILIHAN DAN CARA PERHITUNGAN)	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
				Rumus Perhitungan : Data BPS lapangan usaha sektor pertanian kehutanan dan perikanan berdasarkan PDRB atas dasar harga konstan 2010		
			4 Laju Pertumbuhan PDRB Sektor Pariwisata	Makna : Laju Pertumbuhan PDRB Sektor Pariwisata merupakan indikator untuk menggambarkan peran sektor Pertumbuhan PDRB Sektor Pariwisata dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi.	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata	Data BPS, Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata
				Alasan Pemilihan : Laju Pertumbuhan PDRB Sektor Pariwisata memberikan gambaran dan informasi yang sangat penting untuk mengetahui output pada sektor ekonomi dan melihat pertumbuhan di suatu wilayah tertentu. Dengan bantuan data PDRB, maka dapat ditentukannya sektor unggulan (leading sector) di suatu daerah/wilayah.		
				Rumus Perhitungan : Data BPS lapangan usaha sektor penyediaan akomodasi dan makan minum berdasarkan PDRB atas dasar harga konstan 2010		
		2 Meningkatnya Pertumbuhan Investasi	5 Persentase Peningkatan Investasi Daerah	Makna : Pertumbuhan nilai investasi (Milyar Rupiah) merupakan angka/nilai yang menggambarkan sejauh mana investasi dan permodalan perusahaan dapat dikembangkan di daerah.	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu,	Perhitungan Mandiri, Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu,
				Alasan Pemilihan : Pertumbuhan nilai investasi (Milyar Rupiah) diperlukan sebagai gambaran kegiatan penanaman modal dalam menunjang pertumbuhan ekonomi daerah.		
				Rumus Perhitungan : (Nilai Realisasi Investasi Tahun N - Nilai Realisasi Investasi Tahun Sebelumnya) / Nilai Realisasi Investasi Tahun Sebelumnya x 100%		
2.	Meningkatnya Kualitas SDM	3 Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat	6 Usia Harapan Hidup	Makna : Usia Harapan Hidup penduduk adalah rata-rata kesempatan atau waktu hidup yang tersisa. Usia Harapan Hidup dapat diartikan pula dengan banyaknya tahun yang ditempuh penduduk yang masih hidup sampai umur tertentu.	Dinas Kesehatan,	Data BPS, Dinas Kesehatan
				Alasan Pemilihan : Usia Harapan Hidup merupakan alat untuk mengevaluasi kinerja pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan penduduk pada umumnya, dan meningkatkan derajat kesehatan pada khususnya. Rumus Perhitungan : Umur masing-masing yang meninggal dijumlahkan semuanya dan kemudian dibagi dengan jumlah orang yang meninggal pada tahun itu.		

NO.	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	PENJELASAN (MAKNA, ALASAN PEMILIHAN DAN CARA PERHITUNGAN)	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
		4 Meningkatnya Kualitas Pendidikan	7 Angka Rata-Rata Lama Sekolah	Makna : Rata-rata Lama Sekolah (RLS)/Mean Years School (MYS) didefinisikan sebagai jumlah tahu yang digunakan oleh penduduk dalam menjalani pendidikan formal. Alasan Pemilihan : Mengetahui kualitas pedididikan masyarakat dalam suatu wilayah. Rumus Perhitungan : RLS = 1/n x n∑i=1 x i Ket: RLS = Rata-rata Lama Sekolah Penduduk Usia 25 tahun ke atas xi = Lama Sekolah Penduduk ke -/ yang berusia 25 tahun N = Jumlah Penduduk Usia 25 tahun ke atas	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Data BPS, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
			8 Angka Harapan Lama Sekolah	Makna : Angka Harapan Lama Sekolah (HLS) didefinisikan sebagai lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang. Alasan Pemilihan : Mengetahui kondisi pembangunan sistem pendidikan di berbagai jenjang. Rumus Perhitungan : HLSta = FK x n/∑ i=a Eti / Pti Ket: HLSta = Harapan Lama Sekolah pada umur a di tahun t Eti = Jumlah Penduduk Uisa I yang Bersekolah pada tahun t I = Usia (a, a + 1, . . . N) FK = Faktor Koreksi Pesantren	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Data BPS, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		5 Meningkatnya Pengeluaran Perkapita	9 Pengeluaran Perkapita	Makna : Pengeluaran rata-rata per kapita adalah biaya yang dikeluarkan untuk konsumsi semua anggota rumah tangga selama sebulan baik yang berasal dari pembelian, pemberian maupun produksi sendiri dibagi dengan banyaknya anggota rumah tangga dalam rumah tangga tersebut.. Konsumsi rumah tangga dibedakan atas konsumsi makanan maupun bukan makanan tanpa memperhatikan asal barang dan terbatas pada pengeluaran untuk kebutuhan rumah tangga saja, tidak termasuk konsumsi/pengeluaran untuk keperluan usaha atau yang diberikan kepada pihak lain. Pengeluaran untuk konsumsi makanan dihitung selama seminggu yang lalu,sedangkan untuk bukan makanan dihitung selama sebulan dan 12 bulan yang lalu. Baik konsumsi makanan maupun bukan makanan selanjutnya dikonversikan ke dalam pengeluaran rata-rata sebulan. Angka-angka konsumsi/pengeluaran rata-rata per kapita yang disajikan dalam publikasi ini diperoleh dari hasil bagi jumlah konsumsi seluruh rumah tangga (baik mengkonsumsi makanan maupun tidak) terhadap jumlah penduduk. Alasan Pemilihan :	Bagian Perekonomian Setda	Data BPS, Bagian Perekonomian Setda

NO.	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	PENJELASAN (MAKNA, ALASAN PEMILIHAN DAN CARA PERHITUNGAN)	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
				Pengeluaran perkapita menggambarkan tingkat kesejahteraan yang dinikmati oleh penduduk sebagai dampak semakin membaiknya ekonomi Rumus Perhitungan : EYS=Sigma(E/P)		
3.	Menurunnya Kemiskinan	5 Menurunnya Ketimpangan Pendapatan	10 Indeks Gini Rasio	Makna : Indeks Gini Rasio merupakan gambaran untuk menunjukan adanya pemerataan distribusi pendapatan antar penduduk. Alasan Pemilihan : Indeks Gini Rasio diperlukan sebagai bahan evaluasi tingkat keberhasilan dalam menurunkan ketimpangan dalam pendapatan. Rumus Perhitungan : Gini Rasio = 1 - P i (Q i + Q i - 1) P i : persentase rumahtangga atau penduduk pada kelas ke-i Q i : persentase kumulatif total pendapatan atau pengeluaran sampai kelas ke-i	Dinas Sosial	Data BPS, Dinas Sosial
		6 Menurunnya Tingkat Pengangguran Terbuka	11 Tingkat Pengangguran Terbuka	Makna : Angka pengangguran terbuka merupakan gambaran kemampuan ekonomi untuk menciptakan lapangan kerja yang mampu menyerap persediaan (supply) tenaga kerja yang ada. Semakin tinggi nilai indikator ini, semakin banyak persediaan tenaga kerja yang tidak termanfaatkan. Indikator ini dapat memberikan sinyal tentang kinerja pasar kerja dan berlangsungnya kondisi ekonomi tertentu, seperti resesi, perubahan siklus bisnis dan teknologi, dan lain-lain. Alasan Pemilihan : Nilai angka pengangguran terbuka diperlukan sebagai bahan evaluasi tingkat keberhasilan ketenagakerjaan dan acuan bagi Pemerintah dalam menciptakan lapangan kerja baru. Rumus Perhitungan : $\text{TPT} = \frac{Jumlah\ Pengangguran\ terbuka\ usia\ angkatan\ kerja}{Jumlah\ penduduk\ angkatan\ kerja}\ x\ 100\%$ Keterangan : TPT = Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	Dinas Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah Dan Tenaga Kerja	Data BPS, Perhitungan Mandiri, Dinas Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah Dan Tenaga Kerja
4	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	7 Meningkatnya Kualitas Reformasi Birokrasi	12 Nilai SAKIP	Makna : Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (E-SAKIP) dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Reformasi dan Birokrasi terhadap substansi perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja , evaluasi kinerja dan pencapaian sasaran kinerja. Alasan Pemilihan : Dengan Nilai SAKIP Pemerintah Kabupaten Balangan dalam hal ini Sekretariat Daerah yang merupakan salah satu tim pembina SAKIP kabupaten mampu mengukur tingkat akuntabilitas kinerja baik level Pemda, SKPD hingga ke Individu mampu mengukur tingkat akuntabilitas kinerja baik itu level Pemda, SKPD hingga ke Individu Pegawai. Rumus Perhitungan : LHE SAKIP Kemenpan RB RI	Setda, Inspektorat, Bapperida dan Seluruh SKPD	LHE SAKIP Kemenpan RB RI, Setda, Inspektorat, Bapperida dan Seluruh SKPD

NO.	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	PENJELASAN (MAKNA, ALASAN PEMILIHAN DAN CARA PERHITUNGAN)	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
			13 Nilai Opini BPK	Makna : Opini Badan Pemeriksa Keuangan merupakan pernyataan profesional pemeriksa mengenai kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan yang didasarkan pada empat kriteria yakni kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan, kecukupan pengungkapan (adequate disclosures), kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan efektivitas sistem pengendalian intern. Alasan Pemilihan : Untuk mengetahui kualitas pengelolaan keuangan negara yang menjamin bahwa informasi keuangan telah wajar disajikan sesuai standar akuntansi pemerintahan. Rumus Perhitungan : Perolehan Opini WTP dalam LHP BPK atas LKPD (UU Nomor 15 Tahun 2004)	BPKPAD, Inspektorat	LHP BPK atas LKPD, BPKPAD, Inspektorat
			14 Nilai EKPPD	Makna : EKPPD kabupaten/kota merupakan hasil evaluasi oleh Tim Daerah yang kemudian divalidasi oleh Tim Nasional pada saat EKPPD dilaksanakan (pembobotan nilai adalah 100% di dapat dari indeks capaian kinerja sebesar 95% dan indeks kesesuaian materi sebesar 5% pada capaian urusan pemerintahannya). Alasan Pemilihan : Untuk mengetahui kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah dengan menggunakan sistem pengukuran kinerja. Rumus Perhitungan : Hasil Penilaian LPPD oleh Kementrian Dalam Negeri	Setda dan Seluruh SKPD	Hasil Penilaian LPPD oleh Kementrian Dalam Negeri , Setda
4	4 Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	8 Meningkatnya Kualitas Reformasi Birokrasi	15 Nilai IPP	Makna : Indeks Pelayanan Publik adalah indeks yang digunakan untuk mengukur kinerja pelayanan publik berdasarkan Aspek Kebijakan Pelayanan, Aspek Profesionalisme SDM, Aspek Sarana Prasarana, Aspek Sistem Informasi Pelayanan Publik, Aspek Konsultasi dan Pengaduan serta Aspek Inovasi. (Permenpan Nomor 17 Tahun 2017 tentang Pedoman Penialian Kinerja Unit Penyelenggara Pelayanan Publik). Alasan Pemilihan : Guna memperoleh gambaran tentang kondisi kinerja penyelenggaraan pelayanan publik untuk kemudian dilakukan perbaikan dalam rangka peningkatan. Rumus Perhitungan : Tahapan Penghitungan Indeks Pelayanan Publik : 1. Menentukan Nilai untuk Setiap Indikator : Nilai per Indikator : (nilai F01 + Nilai F02 + Nilai F03) / 3 x Bobot per Indikator 2. Menentukan nilai setiap aspek Nilai per aspek: ∑nilai per indikator 3. Menentukan Indeks Nilai Indeks :∑nilai aspek n x bobot aspek n) Aspek Penilaian Indeks Pelayanan Publik: Kebijakan Pelayanan, Profesionalisme SDM, Sarana Prasarana, Sistem Informasi Pelayanan Publik, Konsultasi dan Pengaduan Inovasi	Setda dan UPP	Setda dan UPP

NO.	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	PENJELASAN (MAKNA, ALASAN PEMILIHAN DAN CARA PERHITUNGAN)	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
			16 Nilai IKM	Makna : Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) adalah merupakan suatu ukuran untuk mengetahui tingkat kinerja unit pelayanan secara berkala sebagai bahan untuk menetapkan kebijakan dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik selanjutnya. Alasan Pemilihan : Dalam rangka mewujudkan tingkat kinerja masing-masing unit pelayanan instansi pemerintah, juga dapat memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk menilai secara obyektif dan periodik terhadap perkembangan unit pelayanan publik. Rumus Perhitungan : Bobot nilai rata-rata tertimbang = Jumlah bobot/jumlah unsur IKM = (Total dari Nilai Persepsi Per Unsur/Total Unsur yang terisi) x Nilai Penimbang	Setda dan UPP	Setda dan UPP
		9 Meningkatnya Kualitas SDGS Desa	17 Indeks Desa Membangun	Makna : Indeks Desa Membangun (IDM) merupakan Indeks Komposit yang dibentuk berdasarkan tiga indeks, yaitu : Indeks Ketahanan Sosial, Indeks Ketahanan Ekonomi dan Indeks Ketahanan Ekologi/Lingkungan. Alasan Pemilihan : Indeks Desa Membangun memotret perkembangan kemandirian Desa berdasarkan implementasi Undang-Undang Desa dengan dukungan Dana Desa serta Pendamping Desa. Indeks Desa Membangun mengarahkan ketepatan intervensi dalam kebijakan dengan korelasi intervensi pembangunan yang tepat dari Pemerintah sesuai dengan partisipasi Masyarakat yang berkorelasi dengan karakteristik wilayah Desa yaitu tipologi dan modal sosial. Rumus Perhitungan : Indeks Variabel = (∑ Indikator X) / (Nilai Maksimum (X)) Indeks dari setiap variabel menjadi Indeks Komposit yang disebut dengan Indeks Desa membangun (IDM)	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Serta Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Serta Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

BUPATI BALANGAN,

H. ABDUL HADI